

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR**



WA ODE YULINTI FITIRI

1310421042

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2017

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR**



Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana manajemen

WA ODE YULIANTI FITIRI

1310421042

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

ANALISIS RISIKO DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

WA ODE YULIANTI FITIRI
1310421042

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi Pada
Tanggal **20 Juli 2017** Dan Dinyatakan **LULUS**

Makassar, 29 Juli 2017
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Drs. Syamsuddin Bidol, M.M

**Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan
Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Dr.Ir. Mujahid, S.E., M.M.

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan
Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Dr. Hj. Hadiati, M.Si.

SKRIPSI

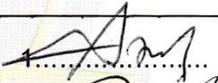
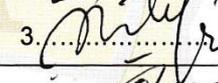
ANALISIS RISIKO DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

WA ODE YULIANTI FITIRI
1310421042

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **20 Juli 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.M.	Ketua	1..... 
2.	Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Sri Adrianti Muin, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4.	Dr. A. Ansir Launtu, S.T., S.E., M.M.	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI MANAJEMEN
Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wa Ode Yulianti Fitiri
NIM : 1310421042
Program Studi : Manajemen

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Risiko Dan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Iuran Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar**" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar 01 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan


Wa Ode Yulianti Fitiri

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya-Nyasehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ **Analisis Risiko Dan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar**”. Penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Fajar Makassar. Sholawat serta salam pun penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua penulis, La Fitiri SP dan Wa Ode Hasnah yang selalu memberikan doa serta dukungan sertasaudara penulis, La Ode Muhammad Fathun, S.IP, M.HI dan Hasrul Fitiri SH, MT yang tidak henti – hentinya memberi dukungan dan motivasi.

Dan juga pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Prof. Sadly Abdul Djabar MPA Selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Hadiati M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu-ilmu Sosial
3. Bapak Dr.Ir. Mujahid,SE.,M.M selaku ketua jurusan program studi Manajemen.
4. Bapak Drs. Syamsudin Bidol,M.M selaku pembimbing

5. Sahabat Wulandari Pryangan, Wa Ode Rasmawati, Bripda Nur Intan Amaliyah, Agus Mustika Sari, Yolanda wirayani.
6. Bripda La Ode Nirmi untuk semua dukungan dan harapan
7. Lestari dan Winda sawitri teman seperjuangan dari awal hingga akhir, senang bisa berjuang bersama.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi, peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Universitas Fajar dan perusahaan terkait.

Makassar, Juli 2017

peneliti

ABSTRAK

Analisis Risiko Dan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

WA ODE YULIANTI FITIRI

SYAMSUDDIN BIDOL

Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Iuran yang dibayarkan sebagian dipotong dari gaji peserta dan sebagian dibayarkan oleh perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko dan faktor-faktor keterlambatan pembayaran iuran dari perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa (1) risiko bagi perusahaan yang terambat membayar iuran adalah tidak dapat mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, dapat dikenai sanksi hukum dan pidana. (2) bahwa terdapat empat faktor penyebab keterlambatan pembayaran iuran yaitu : Faktor Likuiditas perusahaan, faktor kesengajaan, kurangnya kesadaran akan jaminan sosial, dan faktor kepentingan lain.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Pembayaran Iuran

ABSTRACT

Risk Analysis And Factors Cause Delayed Payment Of Contributions At BPJS Employment Branch Of Makassar

WA ODE YULIANTI FITIRI

SYAMSUDDIN BIDOL

BPJS Contributions Employment payable monthly is calculated based on a percentage of basic salary and fixed allowance. Dues paid partially deducted from the participant's salary and partially paid by the company. The purpose of this study is to analyze the risks and factors of delay payment of contributions from the company to BPJS Employment. This research uses descriptive qualitative method.

The results obtained from this study include that (1) the risk for companies that are inhibited to pay dues is not able to get the benefits from the program BPJS Employment, may be subject to legal and criminal sanctions. (2) that there are four factors causing delay in payment of dues, namely: Corporate Liquidity Factors, intentional factors, lack of awareness of social security, and other factors of interest.

Keywords: Employment BPJS, Payment of Contribution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Analisis Risiko	8
2.2 Pengertian iuran	14
2.3 Ketentuan Membaya Iuran.....	14
2.4 Tinjauan Empirik.....	18
2.5 Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Rancangan Penelitian	20
3.2 Kehadiran Peneliti	20
3.3 Lokasi Penelitian	21
3.4 Sumber Data.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Analisis Data.....	24
3.7 Pengecekan Validasi Data.....	24

3.8 Tahap-Tahap Penelitian.....	26
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	30
4.2 Paparan Informasi Dari Wawancara.....	33
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
DAFTAR WAWANCARA.....	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Peluang terjadinya risiko.....	13
Tabel 2.2 Matriks Risiko.....	13
Table 2.3.1 Dasar Perhitungan Tarif Iuran Bulanan BPJS Ketenagakerjaan..	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	
2 Dokumentasi.....	
3 Daftar Wawancara	
4 Daftar Piutang luran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial, sehingga dengan adanya jaminan sosial, risiko keuangan yang dihadapi oleh seseorang, baik itu karena memasuki usia tidak produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan bahkan kematian, akan diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu dari program pemerintah Indonesia yang menggantikan peran ASKES sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan diharapkan mampu menjadi lebih baik lagi dari jamsostek. Perusahaan wajib mengikut sertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk realisasi kemauan perusahaan untuk peduli terhadap pekerjanya. Setiap pekerja akan dipotong sebagian dari gaji sebagai iuran dari pembayaran BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk asuransi sosial dan bantuan sosial. Dikatakan sebagai asuransi sosial karena:

1. Biaya yang diperoleh dari iuran pengusaha dan tenaga kerja
2. Partisipasi diwajibkan, dengan beberapa pengecualian.
3. Tingkat iuran dan tunjangan sering dikaitkan dengan posisi seseorang atau penghasilannya.
4. Hak seseorang akan tunjangan dijamin oleh bukti iurannya.

Setiap tahunnya, biasanya jumlah karyawan pada suatu perusahaan bertambah dan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Meningkatkan kesejahteraan karyawan semata-mata bukan hanya untuk keuntungan karyawan itu sendiri melainkan juga untuk keuntungan perusahaan, karena dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan biasanya diiringi dengan peningkatan produktivitas dari para karyawan. Kesejahteraan karyawan bisa berupa gaji, bonus dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada hal lain yang sebetulnya tidak kalah penting yaitu kesehatan dan keselamatan para karyawan. Kedua hal ini harus sangat diperhatikan oleh perusahaan karena ini berhubungan dengan pekerjaan mereka.

Dalam hal perlindungan sosial diperlukan untuk kesejahteraan, secara umum mencakup dua prinsip, yaitu :

1. Tindakan kolektif untuk menutup berbagai kemungkinan yang terjadi pada tenaga kerja.
2. Penyedia layanan untuk menangani kebutuhan para pekerja.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa :

1. Setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan layanan untuk masyarakat tersebut merupakan salah satu layanan sosial. Perlindungan sosial diperlukan untuk kesejahteraan, baik karena memenuhi kebutuhan hidup, dan tanpa hal tersebut masyarakat akan menjadi

tidak nyaman apabila terjadi suatu hal yang dapat menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah, untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan mertabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Risiko-risiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para perkerja dari risiko-risiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya, agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Risiko ketidakmampuan perusahaan menanggung kesejahteraan pekerjanya yang mungkin timbul dikemudian hari akan menimbulkan masalah ekonomi bagi pekerjanya. Dengan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan akan mengurangi risiko tersebut. Perusahaan cukup dengan membayar iuran dengan memotong gaji pekerjanya maka manfaatnya akan dirasakan dikemudian hari. Namun hal ini berlaku jika Perusahaan tertib dalam membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan cabang makassar mencatat banyaknya daftar perusahaan yang masih tidak tertib dalam hal pembayaran iuran setiap bulannya. Hal ini tentu saja berpengaruh signifikan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga perusahaan. Keterlambatan pembayaran tersebut tentu saja ada faktor yang melatar belakangi dan juga ada risiko yang akan di timbulkan.

Melihat permasalahan tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai : “Analisi Risiko dan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Iuran Bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar .

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah “ Apakah risiko dan faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan ? “

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui risiko dan faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana risiko dan faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar serta faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran iuran tersebut sehingga bisa dianalisis agar mampu mengurangi risiko yang mungkin terjadi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji.
 - b. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan kuliah pada Universitas Fajar Makassar.
2. Bagi unit kerja
 - a. Sebagai bahan referensi bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang makassar dalam pelaksanaan administrasi perusahaan.
3. Bagi perguruan Tinggi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bagi perguruan tinggi.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pembandingan atau referensi bagi peneliti lainnya yang membutuhkan dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Risiko

2.1.1 Pengertian Risiko

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Kata “risiko” banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang, misalnya, “bersepeda motor di jalan yang sangat ramai sangatlah berisiko. Menurut Zulkifli (2005), risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai (operasional sebagai deviasi standar).

Menurut Hanafi (2006) risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return-ER*) dengan tingkat pengembalian (*actual return*).

Istilah “risiko” (*risk*) memiliki banyak definisi. Tetapi pengertian secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam. Menurut kamus bahasa Indonesia versi *online*, risiko adalah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan), (membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan”. Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu.

Definisi konseptual mengenai risiko Menurut Robert Charette, 2000 bahwa :

1. Risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang.
2. Risiko melibatkan perubahan (misalnya perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat).

3. Risiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Tampak bahwa risiko merupakan hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia karena dalam setiap kegiatan pasti ada berbagai ketidakpastian (*uncertainty*). Faktor ketidakpastian inilah akhirnya menimbulkan risiko pada suatu kegiatan. Dalam hal ini beberapa ahli mendefinisikan risiko sebagai berikut :

- a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard M.H,1997).
- b. Risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau *loss* (A.Abas Salim,2007).
- c. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu dalam kondisi tertentu (William & Heins, 1985).

Risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian itu terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

2.1.2 Kategori Risiko

Secara ringkas risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun demikian dalam ranah analisis investasi, risiko di definisikan sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ini muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Dengan adanya manajemen risiko maka manusia berharap dapat mengurangi ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian atau dalam rangka memperkecil tingkat deviasi standar antara harapan dengan realita.

Dalam berbagai kasus, risiko bisa menghancurkan organisasi perusahaan. Untuk itu risiko perlu dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan. Risiko adalah buah dari ketidakpastian. Dalam hal ini terdapat faktor-faktor ketidakpastian yang dapat menghasilkan berbagai macam risiko. Itulah sebabnya risiko dapat dikategorikan menjadi :

a. Risiko berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya, risiko dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

- a. Risiko Spekulatif (*speculatif risk*). Ini adalah risiko yang memang sengaja diadakan agar dipihak lain dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan.
- b. Risiko Murni (*pure risk*). Ini adalah risiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba.

b. Risiko berdasarkan kemungkinannya untuk dialihkan

- a. Risiko yang dapat dialihkan. Ini adalah risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai obyek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian kerugian tersebut menjadi tanggungan (beban) perusahaan asuransi.
- b. Risiko yang tidak dapat dialihkan. Ini adalah semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi.

2.1.3 Sumber-sumber penyebab risiko

Menurut sumbernya-sumbernya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Risiko Internal

Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, manajemen, dll.

b. Risiko Eksternal

Risiko eksternal adalah risiko yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi diluar kontrol perusahaan. Biasanya, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan risiko eksternal memiliki frekuensi yang rendah atau jarang terjadi, tapi berdampak tinggi sehingga menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan atau tidak diperkirakan sebelumnya.

c. Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan. Risiko operasional, disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi.

2.1.4 Penilaian dan Pengukuran Risiko

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari risiko sering dikaitkan dengan konotasi negatif seperti bahaya, ancaman, atau kerugian. Risiko juga dapat disebut sebagai ketidakpastian yang dapat menimbulkan perubahan. Perubahan yang terjadi dari

risiko ternyata bukan hanya perubahan yang bersifat negatif tapi juga yang bersifat positif. Pengertian risiko menurut Silalahi (dalam Husien Umar, 2001) adalah:

- a. Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian.
- b. Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian.
- c. Risiko adalah ketidakpastian.
- d. Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan.
- e. Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan.

Oleh karena risiko merupakan hal yang ditakuti oleh perusahaan, maka di butuhkan proses pencegahan risiko dengan cara pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko adalah suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan tentang apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Hendriksen (dalam Zuhroh dan Pande, 2003) pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien. Wolk dan Tearney (dalam Marwata, 2000) menyatakan pengungkapan mencakup penyediaan informasi yang diwajibkan oleh badan berwenang maupun yang secara sukarela dilakukan perusahaan.

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk meberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna laporan keuangan.

Tujuan pengungkapan risiko menurut Belkaoui (2000) adalah:

- a. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
- b. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
- c. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
- d. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
- e. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.
- f. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

Menurut Pastiarsa (2015) penilaian dan pengukuran risiko merupakan proses penelitian dan pengukuran terhadap peluang kejadian dan dampak yang ditimbulkan seandainya risiko terjadi. Penilaian dan pengukuran risiko terdiri dari analisa kualitatif, dan analisa kuantitatif. Dampak risiko adalah tingkat kerugian atau keparahan material yang timbul seandainya risiko terjadi. Berikut ini contoh table untuk menentukan peluang terjadinya risiko. (Tabel1) dampak terjadinya risiko dan (Tabel2) untuk menentukan tingkat risiko.

Table 2.1 Peluang Terjadinya Risiko

Peluang Terjadi Risiko	Skala	Kriteria
Sangat Besar	5	Frekuensi atau presentase kejadiannyasangattinggiyaitul ebihdari 80%
Besar	4	Frekuensi atau presentasekejadiannyatinggiyaitu>60% sampaidengan 80%
Sedang	3	Frekuensi atau presentasekejadiannyacukupyaitu 40% sampaidengan 60%
Kecil	2	Frekuensi atau presentasekejadiannyatidakterlalutinggiyaitu>20% sampai 40%
Sangat Kecil	1	Frekuensi atau presentasekejadiannyatidaksignifikanyaitusampaid engan 20%

Sumber: Pasiarsa, 2015

Table 2.2 MatriksRisiko (Pastiarsa, 2015)

	DampakRisiko				
Peluangter jadirisiko	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	SangatTinggi
SangatBes ar	Tinggi	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim	Ekstrim
Besar	Moderat	Tinggi	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sedang	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Kecil	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangatkec il	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggo	Tinggi

Sumber: Pastiarsa, 2015

2.2 Pengertian Iuran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah.

2.3 Keteraturan Membayar Iuran

Perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

2.3.1 Dasar Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal juga dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan hasil transformasi atau peralihan dari program JAMSOSTEK sebelumnya. Program ini khusus memberikan jaminan sosial ekonomi untuk para pekerja yang bekerja di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan.

Setiap karyawan atau pegawai baik pegawai yang bekerja di perusahaan maupun pegawai mandiri bisa ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mendaftar secara kelompok/kolektif, baik melalui perusahaan tempat bekerja atau melalui wadah kelompok minimal 10 orang untuk para pekerja secara mandiri.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Iuran yang dibayarkan sebagian dipotong dari gaji peserta dan sebagian dibayarkan oleh perusahaan, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan program peralihan dari Jamsostek, program-program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan pun tidak jauh berbeda dengan program-program yang diusung oleh Jamsostek, saat ini ada 4 program utama dari BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

1. Program jaminan hari tua (JHT)
2. Program Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
3. Program Jaminan Pensiun (JP)
4. Program Jaminan kematian (JKM)

Perhitungan iuran bulanan dari BPJS Ketenagakerjaan pun disesuaikan dengan program-program tersebut yang besarnya dihitung berdasarkan persentase dari upah sebulan (gaji pokok dan tunjangan tetap). Berikut dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan :

a. Tarif Iuran Bulanan Untuk Program Jaminan Hari tua (JHT)

Besar iuran yang harus dibayarkan setiap bulan untuk program jaminan hari tua (JHT) adalah sebesar 5,7% dari upah sebulan dengan rincian:

- a. 2% dipotong dari upah pekerja
- b. 3.7% dibayarkan oleh pemberi kerja
- c. Upah sebulan yang dijadikan dasar perhitungan adalah Gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap.

b. Tarif Iuran Bulanan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Sedangkan besar iuran bulanan yang harus dibayarkan untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dihitung berdasarkan persentase yang disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja, dikali dengan upah sebulan (gaji pokok dan tunjangan tetap) dengan rincian:

- a. Tingkat risiko sangat rendah, 0,24% dari upah sebulan
- b. Tingkat risiko rendah, 0,54% dari upah sebulan
- c. Tingkat risiko sedang, 0.89% dari upah sebulan
- d. Tingkat risiko tinggi, 1,27% dari upah sebulan
- e. Tingkat risiko sangat tinggi, 1.74% dari upah sebulan
- f. Tingkat risiko sangat rendah, 0,24% dari upah sebulan
- g. Tingkat risiko rendah, 0,54% dari upah sebulan

- h. Tingkat risiko sedang, 0.89% dari upah sebulan
- i. Tingkat risiko tinggi, 1,27% dari upah sebulan
- j. Tingkat risiko sangat tinggi, 1.74% dari upah sebulan

Iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja seluruhnya dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), yang besarnya tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja yang sesuai, besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada table tingkat risiko di atas, semakin besar tingkat risiko lingkungan kerja maka persentase perhitungannya pun semakin besar.

C. Dasar Perhitungan Tarif untuk Program jaminan pensiun (JP)

Dasar perhitungan tarif iuran bulanan untuk program jaminan pensiun (JP) adalah sebesar 3% dari upah perbulan (gaji pokok + tunjangan tetap) dengan rincian:

- a. 2% di bayar oleh pemberi kerja
- b. 1% dipotong dari gaji pekerja
- c. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Sejak tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah).

BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.

- d. Dasar perhitungan tarif iuran bulanan untuk program jaminan kematian (JKM).

Sedangkan dasar perhitungan tarif bulanan untuk program jaminan kematian atau JKM adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan, dibayarkan oleh perusahaan.
- b. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan, dibayar oleh pribadi
- c. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Table Dasar Perhitungan Tarif Iuran Bulanan BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS TK	Tarif	Keterangan
Jaminan Kematian (JK)	Pekerja perusahaan: 0.30% x upah sebulan	dibayar oleh pemberi kerja
	Pekerja bukan penerima upah : Rp. 6.800 /bulan	dibayar oleh pribadi
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Disesuaikan dengan tingkat resiko lingkungan kerja	seluruhnya dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan
	1. Tingkat resiko sangat rendah, 0,24% dari upah sebulan	
	2. Tingkat resiko rendah, 0,54% dari upah sebulan	
	3. Tingkat resiko sedang, 0,89% dari upah sebulan	
	4. Tingkat resiko tinggi, 1,27% dari upah sebulan	
5. Tingkat resiko sangat tinggi, 1,74% dari upah sebulan		
Jaminan Pensiun (JP)	3% dari upah sebulan	2% dibayar oleh pemberi kerja, 1% dibayar oleh pribadi
Jaminan Hari Tua (JHT)	5.7% dari upah sebulan	2% dibayar oleh pekerja dan 3.7% di bayar oleh pemberi kerja

2.3.2 Waktu Pembayaran Iuran

Pembayaran iuran bulanan untuk bpjs ketenagakerjaan harus dibayarkan paling lambat sampai tanggal 15 bulan berikutnya, jika terlambat membayar iuran maka akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan dari total iuran bulanan yang dibayarkan.

2.4 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulisi. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

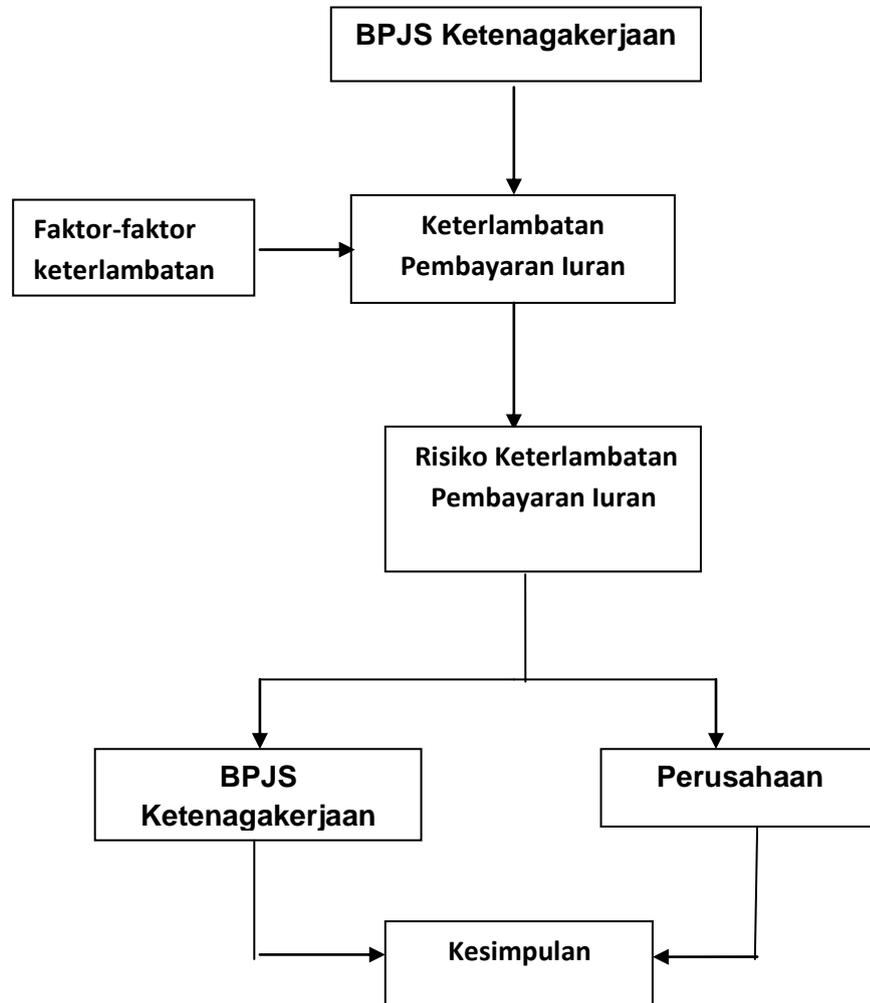
1. Mohamad Faisal (2015) meneliti tentang “Tinjauan Hukum Kewajiban Perusahaan Swasta Terhadap Iuran Wajib Badan Penyelenggara Jaminan sosial Bagi Tenaga Kerja Di Kota Gorontalo”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

Bahwa pelaksanaan kewajiban perusahaan swasta terhadap iuran wajib BPJS bagi tenaga kerja di kota Gorontalo belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan swasta yang belum menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perusahaan swasta terhadap iuran wajib BPJS bagi tenaga kerja di kota Gorontalo , yaitu : Peraturan perundang-undangan, Aparat pengawasan, Sarana dan prasarana, Masyarakat dan Budaya lokal.

2. Arfiliah Nur Pratiwi (2016) “Faktor yang mempengaruhi keteraturan membayar iuran peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) Kategori Peserta Mandiri”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah tempat pembayaran iuran, pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, dan motivasi memiliki hubungan signifikan terhadap keteraturan pembayaran iuran pada pasien peserta mandiri JKN. Sedangkan pekerjaan, pengetahuan, jarak menuju tempat pembayaran

iuran, waktu menuju tempat pembayaran iuran dan persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data-data deskriptif yang tidak menggunakan data berupa angka untuk menerangkan hasil penelitian. Atau dengan kata lain, penelitian kualitatif ini memfokuskan dari pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau data orang itu sendiri/tingkah laku mereka yang melakukan observasi.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif menurut Miles Huberman (1992) adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang di dapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap dalam kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah. Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian dilapangan. Dengan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan *judgment* dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa peneliti harus menjadi instrumen kunci penelitian.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dilapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelumnya, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo Km.4,5, Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan data perusahaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sumber data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Observasi digunakan sebagai teknik yang pertama dilakukan dalam mengamati secara langsung pada perusahaan tersebut dalam berbagai masalah yang muncul pada obyek penelitian sehubungan permasalahan yang dikaji.

- b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapat informasi atau keterangan secara langsung dari responden terkait dengan penelitian. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dengan memperoleh informasi atau keterangan dari beberapa informan.

- c. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data penelitian ini, penulis juga mengambil data tertulis dari sumber-sumber tertulis atau literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan dan analisa data. Yang di maksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain.

Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan memberikan interpretasi dari fenomena dan data yang diperoleh dilapangan dan menarik kesimpulan dari fenomena deskripsi yang bersifat umum ke bersifat khusus. Fenomena yang umum berkaitan dengan aspek keterlambatan pembayaran iuran BPJS, kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut menjadi khusus yang memunculkan risiko yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

3.7 Pengecekan Validasi Temuan

Istilah yang pertamadan yang paling sering digunakan peneliti kualitatif adalah kredibilitas. Kredibilitas menjadi istilah yang paling banyak dipilih untuk mengganti konsep validitas, hal ini dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas penelitian kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan *setting*, proses, kelompok social atau pola interaksi yang kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu untuk mendemonstrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek, penelitian harus dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subjek penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara akurat (Poerwandari, 1998).

Menurut Sugiyono (2006) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan: dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu perilaku masyarakat yang sedang dipelajari.

2. Meningkatkan ketekunan: yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, karena peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.
3. Triangulasi: yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu pertama, triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber misalnya pemimpin, bawahan dan kerabat. Kedua, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik berbeda misalnya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari, siang hari dan sore hari biasanya akan berbeda.
4. Analisis kasus negatif: yaitu kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Disini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan ditemukan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi: yaitu adanya pendukung untuk
6. Mengadakan *membercheck*: yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga semakin kredibel data tersebut.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong (1999:47) pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : tahap sebelum ke lapangan, tahap ke lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu :

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan :
 - a. Menyusun proposal penelitian
 - b. Menentukan fokus penelitian
 - c. Konsultasi fokus penelitian
 - d. Menghubungi lokasi penelitian
 - e. Seminar proposal penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian.
 - d. Pencatatan data
3. Tahap analisis data, meliputi kegiatan:

- a. Analisis data
 - b. Penafsiran data
 - c. Pengecekan keabsahan data
 - d. Menyimpulkan.
4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan hasil laporan
 - b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Ujian skripsi

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Jaminan Pensiun merupakan program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah. Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan begitu, pekerja akan terus mendapatkan ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa tuanya.

Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan juga ditandai dengan peningkatan manfaat pada program-program lainnya, di antaranya peningkatan manfaat pada Jaminan Kematian, yang sebelumnya mendapat santunan sebesar Rp. 21 Juta bertambah menjadi Rp. 24 Juta. Pada Jaminan Kecelakaan Kerja, peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar maksimal Rp. 20 Juta, ditingkatkan menjadi pengobatan dan perawatan sampai sembuh. Selain itu, jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-*Return To Work* (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima. Dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan manfaat di luar program utama yang disebut *Total Benefit*. Manfaat yang diperoleh meliputi *Housing Benefit* (kemudahan kepemilikan rumah), *Food Benefit* (penyediaan pangan murah), *Education Benefit* (pemberian beasiswa pendidikan), *Transportation Benefit* (kemudahan akses transportasi publik) dan *Health Benefit* (dukungan akses fasilitas kesehatan). Semua manfaat tambahan tersebut melengkapi *Financial Benefit* yang telah disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Untuk mendukung program-program yang dimiliki, BPJS Ketenagakerjaan juga mengoptimalkan pelayanan dengan menggunakan budaya baru yang disebut layanan PRIMA, yaitu Peduli, Ringkas, Interaktif, Modern dan Aktif.

Pengaplikasian budaya ini berdampak pada layanan yang diberikan kepada peserta, di antaranya proses klaim yang cepat serta simplifikasi alur pelayanan dan peningkatan penanganan keluhan peserta. Selain itu, jaringan pelayanan fisik juga dibangun secara masif yang tersebar di penjuru nusantara, di antaranya 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Perintis. Di samping layanan fisik BPJS Ketenagakerjaan, layanan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran juga dipermudah dengan menjalin kerjasama melalui Bank dan Agen. Dengan demikian total jaringan pelayanan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan mencapai lebih dari 200 ribu titik yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Selain Optimalisasi pelayanan, kerjasama dengan instansi pemerintah dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta integrasi data kependudukan melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan kantor layanan publik lainnya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan. Hal ini berdampak positif pada pencapaian kepesertaan per Mei 2015 yang mencapai 17,16 juta

pekerja, jauh lebih tinggi daripada capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar setelah beroperasi penuh, BPJS Ketenagakerjaan akan dapat dengan segera mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja di Indonesia.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.1.2 Filosofi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

3.1.3 Rencana Strategis

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018 disusun sebagai panduan arah pengembangan institusi BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2018. Didalam penyusunannya berbagai faktor yang relevan dan dianggap

secara signifikan mempengaruhi arah institusi telah dimasukkan menjadi pertimbangan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah regulasi, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, teknologi, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan beberapa hal lainnya. Persetujuan Dewan Pengawas atas perubahan rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/05/DEWAS/042015.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi :

Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

b. Misi

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk :

- a. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
- c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

4.1.3 Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

1. Tugas:

- a. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.

- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

2. Fungsi:

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

4.2 Paparan Informasi dari Wawancara

4.2.1 Sistem Pembayaran Iuran pada BPJS Ketenagakerjaan

Sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2015 yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan harus mendaftarkan tenaga kerja mereka. Tentunya untuk terus mendapatkan atau menabung manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan wajib membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Divisi Pemasaran mengenai bagaimana sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dijelaskan bahwa dalam memudahkan pembayaran iuran BPJS memiliki tiga cara pembayaran yaitu :

1. *Electronic Payment System (EPS)*

Electronic Payment System (EPS) yaitu sebuah sistem pembayaran elektronik yang dirancang oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan membayar.

Pembayaran dengan sistem *Electronic pay system* dilakukan dengan cara :

- a. Registrasi akun terlebih dahulu di <https://eps.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs>
- b. Masukkan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP), email, dan kode captcha yang terlihat pada layar pendaftaran. Klik “Registrasi” dan “Ok”.
- c. Selanjutnya peserta akan mendapatkan email aktivasi akun *E-Payment System* BPJS Ketenagakerjaan. Klik link aktivasi yang ada dalam email itu.
- d. Log in dengan akun, dan masukkan PIN. Peserta bisa mengganti PIN sesuai dengan keinginan pada menu “Halaman Ganti PIN”.
- e. Langkah mendaftar EPS selesai.

Setelah mempunyai akun, Peserta bisa menghasilkan kode iuran yang bisa digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Kode iuran yang berstatus UNPAID menandakan iuran belum terbayarkan sedangkan status PAID berarti iuran telah dibayarkan.

2. SIPP ONLINE

BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengeluarkan aplikasi SIPP Online atau Sistem Informasi Pelaporan Peserta Online merupakan sistem aplikasi yang mengolah data laporan data tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dapat diakses secara online. Fungsi Utama Aplikasi SIPP Online yaitu :

- a. Melakukan proses pendaftaran, mutasi pekerja , dan memasukkan data karyawan baru.
- b. Membuat laporan gaji atau biaya tenaga kerja bulanan.
- c. Melakukan pembayaran iuran premi BPJS secara online.

3. Virtual account

Virtual Account yaitu Sistem pembayaran menggunakan kode akun atau nomor akun baik yang menggunakan ATM maupun bayar langsung ke Bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi pemasaran dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan perbulan dengan tiga cara yaitu, Electronic Sytem Payme kode untuk kode iuran yang lebih dari sebulan,SIPP Online yang dibayar perbulan, Virtual Account yang sementara proses mengarahkan perusahaan kembali menggunakan kode iuran.

4.2.2 Pihak yang bekerjasama Dengan BPJS Ketenagakejaan dalam memudahkan Pembayaran Iuran

BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membangun jaringan Service Point Office (SPO) sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta dan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam proses pendaftaran dan pelayanan klaim.

“BPJS Ketenagakerjaan memudahkan pembayaran iuran bekerjasama dengan Bank, yang terdiri dari Bank Mandiri,Bank BNI, Bank BRI, Bank BJB dan bank Bukopin”. Menurut Ibu Didi Divisi Pemasaran.

4.2.3 Keteraturan Pembayaran Iuran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Pasal 13 Ayat 5 dijelaskan bahwa BPJS dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya membayar iuran atau memenuhi kewajiban lain wajib melaporkan ketidakpatuhan pemberi kerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap iuran wajib BPJS bagi tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 11 Tentang BPJS, dimana perusahaan swasta dan tenaga kerjanya wajib ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru dan ditambah dengan Program Jaminan Pensiun yang akan berlaku mulai 1 Juli 2015.

Keteraturan pembayaran iuran adalah menjadi tanggung jawab perusahaan setiap bulannya. Hal ini adalah tanggung jawab perusahaan bagi tenaga kerjanya. Iriani (2009) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran dana sehat secara teratur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, kemampuan membayar iuran, serta kemauan dalam

membayar iuran. Kemampuan seseorang untuk membayar jasa peayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal (Adisasmita,2008)

Namun tidak semua perusahaan teratur dalam pembayaran iuran. Salah satu permasalahan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar adalah terdapat beberapa perusahaan yang terlambat membayar iuran.

Menurut Pak Eko Kepala Bidang Keuangan & TI. Menurut Beliau “Banyak sekali terdapat perusahaan yang masih tidak patuh dalam pembayaran iuran bulannya kepada kami”. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa “Perusahaan yang terlambat membayar iuran tergolong perusahaan dalam skala mikro”.

Menurut Ibu Didi dari Divisi Pemasaran “Bagi pihak BPJS masalah keterlambatan pembayaran iuran adalah masalah yang sangat penting. Kurangnya kesadaran perusahaan akan keterlambatannya membuat ketunggakan menjadi makin parah. Perusahaan baru menyadari keterlambatannya ketika mendapat teguran dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS mengingatkan perusahaan untuk membayar iurandengan cara :

1. Menyurat kepada perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Payment Remender yaitu pihak BPJS memiliki sistem dengan daftar nomor telepon perusahaan atau penanggung jawab untuk dihubungi setiap tanggal 6 akan menerima SMS untuk

mengingatkan posisi iuran terakhir untuk mengingatkan pembayaran.

Kesadaran akan perusahaan untuk membayar iuran seperti yang dijelaskan dari divisi pemasaran dan keuangan sejalan dengan teori tentang kesediaan/kemauan membayar adalah kesediaan individu untuk membayar sejumlah uang sebagai premi (premium) dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. (Wright et al,2009). Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa keteraturan membayar iuran tergantung dari kesadaran dan kemauan peserta.

4.2.4 Faktor-faktor Keterlambatan Pembayaran Iuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Pemasaran dan Kepala Bidang Keuangan & TI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar terdapat beberapa faktor-faktor keterlambatan pembayaran iuran perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

1. Likuiditas Perusahaan

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada divisi pemasaran, diapat dijelaskan bahwa peserta atau perusahaan sebenarnya mampu membayar iuran secara tepat waktu, hanya saja pihak perusahaan memiliki kebutuhan lain untuk dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Bambang Riyanto (2010,hal.25) yang menyatakan bahwa,"Likuiditas

adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

2. Faktor Kesengajaan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Faktor Kesengajaan adalah dimana perusahaan sengaja lalai dalam membayar iuran setiap bulannya. Perusahaan selalu melakukan pembayaran ketika sudah mendapat teguran dari pihak BPJS. “Banyak terdapat perusahaan yang bandel atau sengaja tidak membayar iurannya, karena perusahaan menganggap bahwa jaminan sosial itu bukan menjadi kebutuhan”. Hal ini dikemukakan oleh bapak Eko dari Divisi Keuangan & TI.

3. Kurangnya Kesadaran

a. Kurangnya kesadaran akan jaminan sosial

Pekerja/buruh/perusahaan wajib untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap norma kerja khususnya pelanggaran oleh pengusaha dalam hal kesengajaan tidak mengikutkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dilingkungan kerja mereka kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. “Saat perusahaan bandel tidak mendaftarkan jaminan sosial pekerjanya artinya perusahaan semena-menarik hak yang didapatkan pekerjanya. Hal ini dijelaskan oleh pak Eko dari Divisi Keuangan & TI.

2. Masih terdapat perusahaan yang belum mengetahui manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada beberapa pekerja yang enggan ikut serta karena merasa berat dipotong upahnya dalam ketentuan 2 % pada jaminan hari tua dalam program BPJS

Ketenagakerjaan. “Banyak perusahaan yang menganggap bahwa jaminan sosial itu tidak penting, masih di nomor berapakan untuk pembiayaan perusahaan, sementara sudah jelas dalam undang-undang bahwa jaminan sosial itu wajib”. Hal ini dikemukakan oleh Pak Eko.

4. Kepentingan Lain

“Kebutuhan perusahaan akan kepentingan lain, salah satunya untuk mengikuti tender atau proyek dari pemerintah. Adanya perusahaan yang sengaja membuat perusahaan palsu. Salah satu syarat pemerintah bagi perusahaan yang akan mengikuti tender adalah harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan sudah melakukan pembayaran iuran pertamanya.

Dengan mendaftarkan perusahaannya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan perusahaan bisa mendapatkan sertifikat ,dan saat perusahaan sudah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan perusahaan tersebut berhak mengikuti tender atau proyek dari pemerintah. Ketika Perusahaan tersebut memenangkan tender maka perusahaan tersebut sudah tidak pernah membayar lagi. Jadi perusahaan mendaftartarkan ke BPJS hanya sekedar sementara.”
Demikian pernyataan Bapak Eko dari Divisi Keuangan & TI.

4.2.5 Risiko Bagi Perusahaan dan Bagi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Keterlambatan Pembayaran Iuran

a. Risiko Bagi Perusahaan

Perusahaan diwajibkan secara rutin iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerjanya. Apabila perusahaan terlambat membayar iuran, maka pekerja

yang ditanggung tidak bisa menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Jika pekerja mengalami kecelakaan, maka BPJS Ketenagakerjaan tak bisa memberikan manfaat kepada pekerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pak Eko dari Divisi Keuangan & Ti dan Ibu Didi dari Divisi Pemasaran disimpulkan bahwa Risiko bagi perusahaan yaitu :

1. Tidak mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan saat terjadi Kecelakaan kerja atau kematian untuk tenagakerjanya. Manfaat bisa diperoleh setelah melakukan pelunasan atas tunggakan iuran.
 2. Bisa terkena denda
 3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, pelayanan administrasi dalam bentuk apapun dan bisa ditahan atau dipidanakan oleh negara. BPJS Ketenagakerjaan memiliki Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) dan lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan, KPK dan lembaga ukum lainnya untuk menangani perusahaan yang sengaja menunggak pembayaran iuran.
- b. Risiko Bagi BPJS Ketenagaerjaan
1. Tidak Tercapai target iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 2. Ketika ada perusahaan yang belum daftar maka mengurangi potensi untuk meningkatkan uang untuk diinvestasikan, meningkatkan dana untuk dikelola untuk menciptakan laba, walaupun BPJS Ketenagakerjaan sudah bukan badan usaha

yang berorientasi pada profit tapi sudah menjadi orientasi publik atau pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ditingkatkan keuntungan juga harus dikejar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis risiko dan faktor-faktor keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Likuiditas perusahaan, faktor kesengajaan, kurangnya kesadaran dan kepentingan lain.
2. Adanya keterlambatan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan akan menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak. Risiko bagi pihak perusahaan yaitu, tidak mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, bisa terkena denda dan tidak akan mendapatkan pelayanan publik dalam jenis apapun. Sedangkan risiko bagi Pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu, tidak tercapainya target iuran dan mengurangi potensi untuk meningkatkan uang untuk diinvestasikan.

5.2 Saran

1. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan lagi upaya sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pengusaha dan Pekerja.

2. Pihak perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya tidak menunda-nunda pembayaran iuran agar terhindar dari risiko, baik itu risiko tidak dapat merasakan manfaat dari Jaminan sosial maupun risiko denda dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim.2007. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adam J.Moleong, Steven. 1999.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Ayu, Sri P. 2016. *Analisis Identifikasi Risiko Operasional pada Proses ProduksiPerusahaan Beton Siap Pakai (Ready Mix Concrete) di PT Igaras*. TugasAkhir Program Studi Teknik Industri Universitas Andalas : Padang.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Coyle B and Graham A. 2000. *Framework For Credit Risk Management*. CIB.,Publishing, London.
- Djohanputro. 2006. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta (ID)
- Djunaedi, Zulkifli. 2005. *Prinsip Dasar Manajemen Risiko (Risk Management)*.
- Faisal Mohamad., Skripsi, “*Tinjauan hukum kebijakan perusahaan swasta terhadap iuran wajib badan penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di kota gorontalo*”.
- Herman, Darmawi, *Manajemen risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Husein, Umar. 2001. *Manajemen Risiko Bisnis: Pendekatan Finansial danNonfinansial*. Jakarta: PT. Gramedia PustakaJakarta : Universitas Terbuka.
- Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda,Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WajibPajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*.Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Kontur, R. (2004). *Manajemen Risiko Operasionnal*. Jakarta: PPM
- M. H. Arthur Williams dan Richard.1997. *Risk Management Insurance*.
- Mamduh, M. Hanafi, (2006), *Manajemen Risiko*,.Unit Penerbit dan Percetakan McGraw-Hill/Irwin; 8 edition , 1997.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UI Press.
- Nur Pratiwi Arfiliyah,.,2016 “*Faktor Yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (jkn) Kategori Peserta Mandiri (Studi Kasus Pasien Rawat Inap Rumah Sakit dr. Soebandi Kabupaten Jember)*”Persada, 2003.
- Poerwandari, E. Kristi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*.
- Pramana .Toni.2011 “*Manajemen Risiko Bisnis*”, Cetakan Pertama. Sinar Ilmu Publishing.STIM YKPN, Yogyakarta.

Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV.Alfabeta.

Tampubolon, Robert, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Zuhroh, Diana dan I Putu Pande Heri Sukmawati. 2003. "Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap Reaksi Investor". *Simposium Nasional Akuntansi IV, 2003*.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

LAMPIRAN

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Wa Ode Yulianti Fitiri
 Tempat Tanggal Lahir : Kambara 05 Mei
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jln.Perintis KM7
 Telepon Rumah dan HP : 05299208157
 Alamat *E-mail* : yuliantifitiri@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : SD,SMP,SMA,KULIAH
 Pendidikan Nonformal : -

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -
 Prestasi Nonakademik : -

Pengalaman

Organisasi : Osis
 Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar 17 Juli 2017

Wa Ode Yulianti Fitiri

Dokumentasi Wawancara

Foto 1 : Wawancara Ibu Didi dari Divisi Pemasaran



Foto 2 : Wawancara dengan Bapak Eko Dari Divisi Keuangan & TI



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sistem pembayaran iuran pada BPJS?
2. Pihak apa saja yang bekerja sama dalam memudahkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimanakah keteraturan pembayaran iuran peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan iuran ?
4. Apakah terdapat peserta yang tidak teratur membayar iuran ? Jika ada, Seberapa besar tingkat keterlambatan tersebut ?
5. Apakah perusahaan yang terlambat membayar iuran adalah tergolong perusahaan mikro/makro ?
6. Bagaimana pihak BPJS mengingatkan pembayaran iuran Perusahaan?
7. Apakah keterlambatan pembayaran iuran merupakan masalah yang sangat besar bagi pihak BPJS ?
8. Apakah faktor-faktor keterlambatan perusahaan membayar iuran tersebut menurut pihak BPJS ?
9. Apakah terdapat risiko bagi kedua belah pihak terkait adanya keterlambatan Pembayaran iuran ?

**Daftar
Piutang
luran
Kantor
Cabang :
W00 -
Makassa
r
Per : 06-
2017**

**Jenis
Piutan
g :
Macet**

No.	NPP	DI V	Nama Perusahaan	Sumber		Umu r	Total Piutang
				Kod e	Blth		
1	14010082	00 0	Mitra Bangun Persada	ITRF	12- 201 6	5	949.099,67
2	14012218	00 0	Dentizia Farma Plus	ITRF	01- 201 7	4	1.212.709,76
3	14013527	00	Wankom	ITRF	11-	6	2.199.712,33

		0	Jatam Pura		201 6		
4	15004119	00 0	Abyseka Indocipta	ITRF	01- 201 7	4	656.380,20
5	15005615	00 0	Mugni Sanur Utama	ITRF	12- 201 6	5	2.717.032,82
6	15006514	00 0	Bundaran Emas	ITRF	01- 201 7	4	3.760.566,39
7	15006535	00 0	Gema Karya Persada	ITRF	11- 201 6	6	1.149.674,66
8	15006540	00 0	Marko Utama	ITRF	11- 201 6	6	1.307.861,86
9	15014766	00 0	Siti Namirah Wisata	ITRF	01- 201 7	4	814.195,37
10	15017789	00 0	Berkah Amanah	ITRF	11- 201 6	6	1.045.023,47
11	15021341	00 0	Dinamis Jaya Properti	ITRF	11- 201 6	6	971.417,19
12	15022286	00 0	Rm Angkringan Jogya Cab Makassar	ITRF	12- 201 6	5	814.557,00
13	15024270	00 0	Galenika	ITRF	01- 201 7	4	729.237,60
14	15029229	00 0	Rskd Provinsi Sulawesi Selatan	ITRF	12- 201 6	5	50.600.160,00
15	15033800	00 0	Berkat Pagi	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
16	15033978	00 0	Full Bright Institute	ITRF	01- 201 7	4	543.816,00
17	15038646	00 0	Sumber Medikalindo	ITRF	01- 201 7	4	656.379,36
18	15039551	00 0	Bahama Mitra Utama	ITRF	01- 201 7	4	777.650,80
19	15039657	00 0	Rimba Raya Utama	ITRF	12- 201 6	5	4.726.477,30

20	15043938	00 0	Ilham Jaya Abadi	ITRF	12- 201 6	5	949.095,32
21	15044670	00 0	Karya Lestari Raya	ITRF	01- 201 7	4	2.442.490,48
22	15044989	00 0	Mitra Sinergi Proteksindo	ITRF	12- 201 6	5	2.778.261,07
23	15046352	00 0	Reski Aflah Jaya Abadi	ITRF	11- 201 6	6	1.149.658,86
24	15047010	00 0	Putra Timur	ITRF	01- 201 7	4	1.819.067,24
25	15055069	00 0	Sanshiro Putera Burau	ITRF	01- 201 7	4	4.594.661,39
26	15063802	00 0	Little Oww Kids Distro	ITRF	12- 201 6	5	856.978,94
27	15065923	00 0	Ardeco Luxury Architecture Interior	ITRF	01- 201 7	4	814.162,86
28	15067387	00 0	Medika Arsih Mandiri	DUS R	01- 201 7	4	3.118.620,96
29	15077346	00 0	Yayasan Pendidikan Handayani (Stmik Handayani)	ITRF	12- 201 6	5	3.825.810,56
30	15078910	00 0	Mulya Utama	ITRF	12- 201 6	5	2.671.212,55
31	15107173	00 0	Ali Akbar Jaya Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.149.728,40
32	15107778	00 0	Non Pns Pemerintah Kota Makassar	ITRF	12- 201 6	5	660.527.446,9 0
33	15117284	00 0	Permata Happy Ud	ITRF	01- 201 7	4	567.000,00
34	16001684	00 0	Graha Manggala Abadi Pt	ITRF	12- 201 6	5	110.042.705,5 8
35	16003488	00 0	Kantor Notaris A Somba	ITRF	01- 201 7	4	3.931.200,00

			Tonapa Sh Mh				
36	16003874	00 0	Fajar Techno System Pt	ITRF	12- 201 6	5	6.886.459,60
37	16005562	00 0	Darma Anugerah Cv	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
38	16010346	00 0	Bumi Ambalat Pt	DUS R	12- 201 6	5	1.027.395,99
39	16020589	00 0	Conch Maros Cement Indonesia Pt	ITRF	11- 201 6	6	4.202.211,00
40	16020591	00 0	Conch Maros South Sulawesi Mine Pt	ITRF	11- 201 6	6	1.987.632,00
41	16020997	00 0	Fakhrul Mubarak Cv	ITRF	01- 201 7	4	2.789.645,12
42	16022204	00 0	Pakareso Sarana Sudiang Cv	ITRF	11- 201 6	6	3.705.624,00
43	16024888	00 0	Yusdi Jaya Abadi Cv	ITRF	01- 201 7	4	731.430,00
44	16025015	00 0	Citra Andalan Indonesia Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.410.158,01
45	16026064	00 0	Indra Depo Bangunan	ITRF	11- 201 6	6	2.780.570,24
46	16027532	00 0	Aneka Jaya Abadi Ud	ITRF	11- 201 6	6	4.727.975,62
47	16027894	00 0	Citra Lestari Mandiri Cv	ITRF	11- 201 6	6	3.587.054,82
48	16032293	00 0	Cipta Dimensi Ruang Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.491.064,18
49	16032404	00 0	Karya Balanipa Pratama Pt	ITRF	11- 201 6	6	3.448.978,14
50	16036237	00 0	Rezky Service System Pt	ITRF	01- 201 7	4	115.274.225,3 2
51	16046367	00 0	Regista Bunga Wijaya Hai	ITRF	11- 201 6	6	46.342.847,10

			Pt				
52	16050032	00 0	Sukses Sangga Sejahtera Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
53	16050056	00 0	Antar Indonesia Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.149.658,86
54	16051159	00 0	Putra Liang Jaya Pt - Hotel Melia Makassar	ITRF	11- 201 6	6	273.150.212,0 2
55	16052622	00 0	Bantar Indah Perkasa Pt	ITRF	11- 201 6	6	1.149.661,49
56	16052640	00 0	Multi Global Konstrindo Pt	ITRF	11- 201 6	6	1.149.661,49
57	16056922	00 0	Sandhy Putra Makmur Pt	ITRF	01- 201 7	4	2.625.512,40
58	16059738	00 0	Delta Dimensi Consultant Cv	ITRF	01- 201 7	4	656.381,96
59	16061009	00 0	Regista Bunga Wijaya Otc Kimia Farma	ITRF	12- 201 6	5	52.796.183,31
60	16061334	00 0	Kostel	ITRF	12- 201 6	5	801.948,77
61	16065213	00 0	Insan Sinergi Talenta Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.212.709,76
62	16065362	00 0	Nur Ashabul Mandiri Perkasa Cv	ITRF	01- 201 7	4	814.187,31
63	16065456	00 0	Vikariaza Konstruksi Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.118.043,00
64	16066083	00 0	Daeng Kuliner Makassar	ITRF	12- 201 6	5	17.642.873,36
65	16068128	00 0	Sulapaappa Media Utama Pt	ITRF	11- 201 6	6	3.707.428,03
66	16068318	00 0	Tiga Pilar Utama Pt	ITRF	12- 201 6	5	6.048.418,30
67	16069804	00 0	Vikaria Utama Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.118.043,00

68	16069829	00 0	Fathir Mulia Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.287.799,29
69	16076493	00 0	Lembang Samudera Bersaudara Pt	ITRF	01- 201 7	4	2.442.489,00
70	16086183	00 0	Mega Permata Sari Cv	ITRF	12- 201 6	5	949.098,50
71	16088746	00 0	Joint Indonesia Pt	ITRF	12- 201 6	5	2.859.628,03
72	16091084	00 0	Binatech Dan Partners Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.853.717,48
73	16093534	00 0	Adi Perkasa Makassar Pt	ITRF	11- 201 6	6	15.680.882,10
74	16101602	00 0	Arshiya Cipta Kreasi Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.890.788,87
75	16109073	00 0	Arjuna Kencana Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.148.964,18
76	16109593	00 0	Kirana Utama Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.628.325,72
77	16110210	00 0	Karya Leppujang Konstruksi Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.628.325,72
78	16112287	00 0	Cipta Dimensi Ruang Pt	ITRF	01- 201 7	4	2.442.491,81
79	16117600	00 0	Fadil Jaya Cv	ITRF	12- 201 6	5	1.530.324,23
80	16118259	00 0	Dian Pratama Mandiri Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.853.713,50
81	16118464	00 0	Kopi Zone Prime	ITRF	11- 201 6	6	926.856,74
82	16118513	00 0	Trigama Mega Mamminasa Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.780.572,75
83	16119126	00 0	Diah Teknik Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
84	16119412	00	Muria Utama	ITRF	11-	6	1.001.520,00

		0	Cv		201 6		
85	16120370	00 0	Makassar Sarana Permai Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.304.780,13
86	16120773	00 0	Kamasan Inti Karya Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
87	16120788	00 0	Karmindah Mitra Bersama Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
88	16120980	00 0	Tunas Karya Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
89	16122356	00 0	Anugerah Karya Bersama Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.047.250,95
90	16122669	00 0	Sulfa Abadi Sejahtera Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.149.661,49
91	16122785	00 0	Arsyla Cv	ITRF	11- 201 6	6	1.149.661,49
92	16122796	00 0	Konstruksi Prima Sejati Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
93	16123213	00 0	Lucky Star Mandiri Pt	ITRF	11- 201 6	6	3.448.978,14
94	16123695	00 0	Apotek Glotus	ITRF	11- 201 6	6	1.853.713,50
95	16123705	00 0	Albarokat Jaya Sejahtera Pt	ITRF	11- 201 6	6	1.926.000,06
96	16124439	00 0	Mitra Gemilang Lestari Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
97	16124568	00 0	Tirta Bintang Sejahtera Cv	ITRF	12- 201 6	5	2.862.013,04
98	16124606	00 0	Losari Sejahtera Mandiri Cv	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
99	16124608	00 0	Karya Tirtamarta Indo Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
100	16124934	00 0	Social Politic Genius Cv	ITRF	11- 201 6	6	926.856,74
101	16125611	00 0	Nur Lina	ITRF	11- 201	6	2.299.317,74

					6		
102	16126367	00 0	Panca Perdana Inti Konstruksi Pt	ITRF	11- 201 6	6	2.299.317,74
103	16126871	00 0	Anugrah Jaya Mandiri Cv	ITRF	12- 201 6	5	2.295.486,34
104	16127388	00 0	Bakti Marga Mustika Cv	ITRF	12- 201 6	5	1.898.190,66
105	16127643	00 0	Tirsa Artha Mandiri Pt	ITRF	12- 201 6	5	1.898.190,66
106	16128761	00 0	Ghassani Pt	ITRF	12- 201 6	5	1.530.324,23
107	16128772	00 0	Cv Putri Celebes	ITRF	12- 201 6	5	949.097,50
108	16128803	00 0	Awani Jaya Karya Pt	ITRF	12- 201 6	5	1.898.194,99
109	16129270	00 0	Tamamaung Mandiri Cv	ITRF	12- 201 6	5	949.097,50
110	16130281	00 0	Mandiri Sejahtera	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
111	16133107	00 0	Kahf Muslim Global Pt	ITRF	12- 201 6	5	227.837,69
112	16133272	00 0	Rezkita Sejahtera Bersama Cv	ITRF	12- 201 6	5	768.800,03
113	16134628	00 0	Ril Jaya Utama Cv	ITRF	12- 201 6	5	1.898.190,66
114	16135301	00 0	Ukhuwah Mandiri Cv	ITRF	12- 201 6	5	5.613.676,10
115	16136035	00 0	Pt Arninda Tiga	ITRF	12- 201 6	5	949.097,50
116	17000155	00 0	Albary Zaputra Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.312.758,72
117	17000291	00 0	Duta Global Nusantara Pt	ITRF	01- 201 7	4	3.938.277,04
118	17000308	00 0	Zetta Adi Communicati on Pt	ITRF	01- 201 7	4	8.779.680,00

119	17000734	00 0	Makassar Mitra Sejahtera Ud	ITRF	01- 201 7	4	7.213.096,80
120	17000754	00 0	Karya Wibisana Cv	ITRF	01- 201 7	4	814.162,86
121	17001157	00 0	Laut Raya Krenindo Pt	DUS R	01- 201 7	4	187.710.822,3 9
122	17002420	00 0	Eltratama Karya Mandiri Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.628.327,40
123	17002527	00 0	Jelajah Express Trasindo Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.312.760,43
124	17002583	00 0	Mammiri Industries Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.969.138,08
125	17002647	00 0	Perdana Cipta Abdipertiwi Pt	ITRF	01- 201 7	4	2.442.489,00
126	17003096	00 0	Kabetees Delapan Delapan Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.628.325,72
127	17003119	00 0	Media 98 Communicati on Cv	ITRF	01- 201 7	4	2.442.488,58
128	17003169	00 0	Salsabila Jasa Motor Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.312.758,72
129	17003244	00 0	Aksan Jaya Cv	ITRF	01- 201 7	4	2.899.260,05
130	17003922	00 0	Chaezar Jaya Karya Mandiri Pt	ITRF	01- 201 7	4	2.442.489,00
131	17004345	00 0	Marumbo Perkasa Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.628.340,00
132	17004783	00 0	Ayman Jaya Cv	ITRF	01- 201 7	4	814.162,86
133	17005036	00 0	Sartindo Equipment Pt	ITRF	01- 201 7	4	2.625.517,44
134	17005367	00 0	Turbo 88 Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.629.600,33
135	17006483	00 0	Ud Dian Karya Mandiri	ITRF	01- 201 7	4	656.380,28

136	17006511	00 0	Usaha Bina Bahagia Cv	ITRF	01- 201 7	4	1.314.600,09
137	17007064	00 0	Dian Consultan Cv	ITRF	01- 201 7	4	656.510,40
138	17007381	00 0	Tri Berkah Cv	ITRF	01- 201 7	4	656.380,28
139	17007517	00 0	Apotek Adhyaksa	ITRF	01- 201 7	4	1.312.760,43
140	17007589	00 0	Firman Mulya Jaya Pt	DUS R	01- 201 7	4	2.442.488,58
141	17008870	00 0	Rm. Samudera Rasa	ITRF	01- 201 7	4	687.936,06
142	17009018	00 0	Satria Teknik Utama Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.628.325,72
143	17009476	00 0	Kaori Abitama Cv	ITRF	01- 201 7	4	814.162,86
144	17009487	00 0	Cendrana Semarak Redana Pt	ITRF	01- 201 7	4	1.312.760,43
145	WW0001 27	00 0	Perikanan Nusantara Cab Mks (Eks Samodra Besar)	ITRF	01- 201 7	4	10.024.701,71
146	WW0005 49	00 0	Tuju Wali-Wali	ITRF	01- 201 7	4	54.572.833,73
147	WW0006 78	00 0	Halim Toko	ITRF	12- 201 6	5	2.295.490,26
148	WW0009 47	00 0	Harapan Utama	ITRF	12- 201 6	5	46.221.398,26
149	WW0012 19	00 0	Indah Bumi Bosowa	ITRF	12- 201 6	5	144.491.993,3 4
150	WW0012 66	00 0	Santana Antar Buana	ITRF	12- 201 6	5	6.121.298,59
151	WW0012 83	00 0	Kopkar Prima Patra Tujuh	ITRF	12- 201 6	5	6.767.449,84
152	WW0012	00	Bengkel Ady	ITRF	12-	5	844.866,48

	94	0	Karya		201 6		
153	WW0012 97	00 0	Singlar Furniture Indonesia	ITRF	12- 201 6	5	63.735.862,53
154	WW0013 36	00 0	Bintang Lima	ITRF	01- 201 7	4	1.819.064,65
155	WW0013 82	00 0	Sumber Tehnik	ITRF	12- 201 6	5	686.244,00
156	WW0013 89	00 0	Imperial Aryaduta Hotel (Sedona)	ITRF	01- 201 7	4	246.347.515,8 7
157	WW0014 31	00 0	Elektrika Pln Kopkar	DUS R	12- 201 6	5	5.216.281,20
158	WW0014 81	00 0	Utama Jaya	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
159	WW0015 69	00 0	Bumi Sarana Beton	ITRF	12- 201 6	5	311.452.364,3 9
160	WW0017 60	00 0	Asia Raya Trading Coy	ITRF	01- 201 7	4	2.425.419,52
161	WW0017 94	00 0	Rayagraha Intibuana	ITRF	01- 201 7	4	2.425.419,52
162	WW0018 00	00 0	Dinasti Hotel	DUS R	12- 201 6	5	40.935.128,76
163	WW0018 12	00 0	Baruga Asrinusa Development	ITRF	01- 201 7	4	189.837.076,8 0
164	WW0019 04	00 0	Yamaha Jaya	ITRF	01- 201 7	4	1.500.315,93
165	WW0019 73	00 0	Tri Andika Pratama	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
166	WW0021 79	00 0	Ats	ITRF	12- 201 6	5	14.538.080,15
167	WW0021 96	00 0	Swadaya Makassart (Smart)	ITRF	01- 201 7	4	496.198.584,0 0
168	WW0023 94	00 0	Tirta Mentari Prima	ITRF	12- 201 6	5	5.849.930,08
169	WW0027	00	Bulog	ITRF	12-	5	255.459.560,1

	53	0	(Pegawai Organik)		201 6		6
170	WW0027 78	00 0	Toko Jaya Makmur	ITRF	12- 201 6	5	1.530.324,23
171	WW0028 57	00 0	Hijau Bumi Indonesia	ITRF	12- 201 6	5	14.804.120,28
172	WW0029 03	00 0	Lae-Lae Rm	ITRF	01- 201 7	4	8.255.232,72
173	WW0030 26	00 0	Mahadi	ITRF	12- 201 6	5	4.590.972,67
174	WW0030 34	00 0	Terang Mas Abadi	ITRF	01- 201 7	4	8.377.517,49
175	WW0032 28	00 0	Ksp Bakti Huria	ITRF	01- 201 7	4	65.175.354,09
176	WW0032 71	00 0	Manggala Putra Perkasa	ITRF	12- 201 6	5	1.924.210,05
177	WW0032 80	00 0	Kabila Anugrah Pratama	ITRF	12- 201 6	5	2.295.486,34
178	WW0032 97	00 0	Mie Titi	ITRF	11- 201 6	6	7.178.462,79
179	WW0033 49	00 0	Kawan Setia Toko	DUS R	01- 201 7	4	5.380.895,52
180	WW0033 56	00 0	Century Hotel	ITRF	12- 201 6	5	4.009.743,89
181	WW0035 58	00 0	Prima Panca Perkasa Mandiri	ITRF	01- 201 7	4	2.555.280,00
182	WW0036 25	00 0	Smile Plaza Restaurant	ITRF	11- 201 6	6	10.234.044,96
183	WW0036 63	00 0	Mkip (Bank Btpn Mikro)	ITRF	11- 201 6	6	2.847.398,40
184	WW0040 19	00 0	Adiatma	ITRF	11- 201 6	6	178.097.340,2 5
185	WW0040 86	00 0	Cen Kurir Indonesia	ITRF	12- 201 6	5	1.689.742,08
186	WW0041 14	00 0	Dpd Perkindo	ITRF	01- 201	4	1.118.723,34

			Sulawesi Selatan		7		
187	WW0041 65	00 0	Baraja Salon	ITRF	01- 201 7	4	801.964,80
188	WW0041 98	00 0	Excel Body Work	ITRF	12- 201 6	5	844.866,48
189	WW0044 41	00 0	Reinart Abadi	ITRF	01- 201 7	4	0,00
190	WW0044 44	00 0	Tunas Artha Gardatama	ITRF	12- 201 6	5	613.509,07
191	WW0044 84	00 0	Program Keluarga Harapan	ITRF	11- 201 6	6	14.131.447,20
192	WW0045 20	00 0	Atifak	ITRF	12- 201 6	5	2.308.425,60
193	WW0046 55	00 0	Pratama Titipan Ilahi	DUS R	12- 201 6	5	33.959.817,84
194	WW0047 03	00 0	Asda Karya Utama	ITRF	12- 201 6	5	845.231,65
195	WW0048 95	00 0	Surya Bestari	ITRF	01- 201 7	4	656.379,36
196	WW0049 67	00 0	Percetakan Oci & Aura	ITRF	12- 201 6	5	844.866,48
197	WW0049 85	00 0	Samamaju Prima	ITRF	01- 201 7	4	50.298.563,44
198	WW0051 32	00 0	Tiga Enam Jaya Sentosa	ITRF	01- 201 7	4	1.147.860,00
199	WW0051 50	00 0	Al Salam Anugrah Wisata	ITRF	01- 201 7	4	2.174.256,09
200	WW0051 93	00 0	Tiga Permata	ITRF	12- 201 6	5	9.947.107,47
201	WW0053 75	00 0	Koko Smart	DUS R	01- 201 7	4	3.938.276,16
202	WW0054 00	00 0	Rm Ratu Seafood	ITRF	12- 201 6	5	801.948,77
203	WW0054 69	00 0	Diva Yamasey	ITRF	12- 201	5	1.027.399,76

			Utama		6		
204	WW0055 18	00 0	Dharma Putra Sakt	ITRF	01- 201 7	4	25.036.201,01
205	WW0057 15	00 0	Banguntama Johan Sejahtera	ITRF	12- 201 6	5	949.095,32
206	WW0057 91	00 0	Aditya Inti Sejahtera	ITRF	11- 201 6	6	1.853.713,50
207	WW0058 76	00 0	Bosowa Agro Industries	ITRF	01- 201 7	4	11.454.732,95
208	WW0058 90	00 0	Diatri Promedika	ITRF	01- 201 7	4	7.836.192,00
209	WW0059 09	00 0	Putra Anugrah Perkasa	ITRF	01- 201 7	4	655.200,00
210	WW0059 17	00 0	Biru Langit Wisata	ITRF	01- 201 7	4	606.354,89
211	WW0059 56	00 0	Hengtraco Protec Sindo	ITRF	12- 201 6	5	4.774.690,50
212	WW0059 64	00 0	Wira Kusuma	ITRF	01- 201 7	4	7.364.685,18
213	WW0060 01	00 0	Tiga Sakti Utama	ITRF	12- 201 6	5	2.092.122,00
214	WW0060 05	00 0	Dwi Mitra Lestari	ITRF	12- 201 6	5	765.579,44
215	WW0060 41	00 0	Maiko Karya	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
216	WW0060 42	00 0	Choco Bakery & Noodle	ITRF	01- 201 7	4	8.703.718,85
217	WW0061 07	00 0	Khazana Duta Mandiri	ITRF	12- 201 6	5	41.318.770,64
218	WW0061 40	00 0	Anugrah Alkesindo	ITRF	12- 201 6	5	7.306.107,45
219	WW0061 49	00 0	Qayyim Putra Tunggal	ITRF	12- 201 6	5	1.554.384,00
220	WW0062 95	00 0	Ningrat Muda Mandiri	ITRF	11- 201 6	6	11.637.662,40

221	WW0063 43	00 0	Rajawali Nusindo	ITRF	01- 201 7	4	2.411.136,00
222	WW0064 76	00 0	Bintang Wira Marindah ./ Bosowa Radio	ITRF	01- 201 7	4	1.312.760,39
223	WW0064 85	00 0	Reso Mitra Promosindo	ITRF	12- 201 6	5	765.162,11
Total Piutang Macet							4.292.336.990, 43